

DAFTAR PUSTAKA

- A. Aziz Zuhakim, S. M. (2012, December 12). Mengenal E-Government: Pemahaman Konsep Aplikasi E-Government Sebagai Inovasi Pelayanan Publik. Bengkulu, Indonesia.
- Aditya Wicaksono Irawan, d. (2020). *Laporan Survei Internet APJII 2019-2020 (Q2)*. Retrieved from Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia: <https://apjii.or.id/content/read/39/521/Laporan-Survei-Internet-APJII-2019-2020-Q2>
- Badan Pusat Statistik. (2010, Juli 12). Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 37 Tahun 2010 Tentang Klasifikasi Perkotaan dan Pedesaan di Indonesia. Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia.
- Biro Humas, Hukum dan Kerjasama. (2021, Juli 14). *Kedepankan Pelayanan Publik di digital dalam Masa Pandemi*. Retrieved from Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia: <https://www.kemenkumham.go.id/berita/kedepankan-pelayanan-publik-digital-dalam-masa-pandemi>
- BPS Kabupaten Kediri. (2019, September). Kecamatan Wates Dalam Angka 2019. Kediri, Jawa Timur, Indonesia: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kediri.
- BPS Kabupaten Kediri. (2021, September). Kecamatan Wates Dalam Angka 2021. Kediri, Jawa Timur, Indonesia.
- Buchari, R. A. (2016). IMPLEMENTASI E-SERVICE PADA ORGANISASI PUBLIK DI BIDANG PELAYANAN PUBLIK DI KELURAHAN CIBANGKONG KECAMATAN BATUNUNGGAL KOTA BANDUNG. *Sosiohumaniora Volume 18 No 3*, 235-239.
- Budianto, E. (2020, September 14). Wawancara. (S. Alviana, Interviewer)
- BUPATI KEDIRI PROVINSI JAWA TIMUR. (2019, September 07). PERATURAN BUPATI KEDIRI NOMOR 33 TAHUN 2019 TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEDIRI. Kediri, Jawa Timur, Indonesia.
- Denhardt, J. V. (2007). *The New Public Service*. New York: M.E. Sharpe.
- Dr. Drs. H. Mansyur Achmad KM., M. (2018). *Manajemen dan Tata Kelola Pemerintahan Desa Prespektif Regulatif dan Aplikatif*. Jakarta: PT Balai Pustaka (Persero).
- Dr. J. R. Raco, M. M. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*. Jakarta: GRASINDO.

- Dra. Ihsanira Dhevina E, M. (2018, April 04). *Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia*. Retrieved from Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia: https://setneg.go.id/baca/index/e_government_inovasi_dalam_strategi_komunikasi
- Fatnuriawan, A. (2014). KINERJA APARATUR PEMERINTAH DESA DALAM UPAYA MENINGKATKAN MUTU PELAYANAN PUBLIK DI DESA PUHJARAK KECAMATAN PLEMAHAN KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2014. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Negeri Malang Vol. 1, No. 1*, 1-15.
- Fauzan, R. A. (2017). *PENGARUH PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMANFAATKAN PELAYANAN PUBLIK BERBASIS TEKNOLOGI TERHADAP UPAYA REFORMASI BIROKRASI DI KOTA BANDUNG*. Yogyakarta: FISIPOL UGM.
- Gafur, H. (2019). 88Studi Kewarganegaraan Pada Fungsi Pelayanan Publik Oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Timur. *Citizen Education Vol. 1 No. 1*, 88-95.
- Ginting, M. (2020). *Jaminan Hak Sipil dalam Pemenuhan Layanan Administrasi Kependudukan Selama Pandemi Covid-19*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) .
- Hardiyansyah. (2018). *Kualitas Pelayanan Publik: Konsep, Dimensi, Indikator dan Implementasinya*. Yogyakarta: Gava Media.
- Hardyana, C. (2020, September 17). Penerima Layanan Publik Desa Tawang. (S. Alviana, Interviewer)
- Haryanto. (2018). *Sosialisasi Politik*. Yogyakarta: Penerbit PolGov.
- Hidayat, B. I. (2021). *E-government: konsep, esensi dan studi kasus*. Samarinda: Mulawarman University Press.
- Holle, E. S. (2011). PELAYANAN PUBLIK MELALUI ELECTRONIC GOVERNMENT: UPAYA MEMINIMALISIR PRAKTEK MALADMINISTRASI DALAM MENINGKATAN PUBLIC SERVICE. *Jurnal Sasi Vol.17 No.3*, 21-30.
- Indonesia. (1999, Mei 07). UNDANG-UNDANG PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 1999 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH. Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia.
- Indonesia. (2003, Mei 09). INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2003 TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT. Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia.
- Indonesia. (2009, Juli 18). UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK. Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia.
- Indonesia. (2014, September 30). UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH. Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia.

- Indonesia. (2014, Januari 15). UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA. Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia.
- Indonesia. (2017, November 01). PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 2017 TENTANG PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH. Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia.
- Indonesia. (2018, Oktober 02). PERATURAN PRESIDEN NOMOR 95 TAHUN 2018 TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK. Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia.
- Indrajit, D. R. (2011, November 22). ELECTRONIC GOVERNMENT: STRATEGI PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAYANAN PUBLIK BERBASIS TEKNOLOGI DIGITAL. Yogyakarta, D.I Yogyakarta, Indonesia.
- Indrajit, P. R. (2006). *Electronic Government (Konsep Pelayanan Publik Berbasis Internet dan Teknologi Informasi)*. Jakarta: APTIKOM.
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2020, Mei 22). *PANRB*. Retrieved from KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI: <https://www.menpan.go.id/site/kelembagaan/sistem-pemerintahan-berbasis-elektronik-spbe-2>
- Lembaga Administrasi Negara. (2009, Juli). Standar Pelayanan Publik: Langkah-langkah Penyusunan. Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia.
- Martoyo, S. (2000). *Manajemen Sumber Daya Manusia Edisi 4*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Maschab, M. (2013). *Politik Pemerintahan Desa di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit PolGov.
- Mayowan, Y. (2016). Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Desa (Studi Kasus di Kabupaten Lamongan). . *Jurnal Administrasi Bisnis Vol. 10 No. 1*, 14-23.
- Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia. (2009, September 03). PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA NOMOR 13 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DENGAN PARTISIPASI MASYARAKAT. Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia.
- Presiden Republik Indonesia. (2010, Desember 21). Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 . Jakarta, DKI Jakarta , Indonesia.
- PT. Multi Area Desentralisasi Pembangunan (MADEP): Abdul Manaf, M. P. (2016). *Modul Materi "Good Governance dan Pelayanan Publik"*. Jakarta: Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Kedeputian Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi.

- Purnomo, O. H. (2007). *Efektivitas Website Sebagai Sarana Pelayanan Publik*. Yogyakarta: FISIPOL UGM.
- Reddick, C. G. (2010). *Politics, Democracy, and E-Government: Participation and Service Delivery*. United States of America: Information Science Reference.
- Referensi HAM*. (1966, Desember 16). Retrieved from Lembaga Studi & Advokasi Masyarakat:
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2014/09/KOVENAN-INTERNASIONAL-HAK-SIPIL-DAN-POLITIK.pdf&hl=en_US
- Referensi HAM*. (1966, Desember 16). Retrieved from Lembaga Studi & Advokasi Masyarakat: <https://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2014/09/Kovenan-Internasional-Hak-Ekonomi-Sosial-dan-Budaya.pdf>
- Somantri, G. R. (2005). Memahami Metode Kualitatif. *MAKARA, SOSIAL HUMANIORA*, Vol. 9 No. 2, 57-65.
- Subiakto, H. (2013). Internet Untuk Pedesaan dan Pemanfaatannya Bagi Masyarakat. *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik* Vol.26, No.4, 243-256.
- Sugiman. (2018). Pemerintahan Desa. *Binamulia Hukum* Vol. 7 No. 1, 82-95.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sulaksono, H. (2015). *Budaya Organisasi dan Kinerja*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish (Grup Penerbitan CV Budi Utama).
- Sulistiawan, A. (2020, Juli 20). Sekretaris Desa. (S. Alviana, Interviewer)
- Supriyatno, H. (2014). *Pemkab Kediri Berharap 2015 E-Government Maksimal*. Kediri: Bhirawa Online.
- Surianingrat, D. B. (1976). *Pemerintahan dan Administrasi Desa*. Bandung: PT Mekar Djaya.
- Susetiawan, D. M. (2018). Penguatan Peran Warga Masyarakat dalam Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Hasil Pembangunan Desa. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* Vol. 4 No. 1, 109-118.
- Thoyib, A. (2005). Hubungan Kepemimpinan, Budaya, Strategi, dan Kinerja: Pendekatan Konsep. *Jurnal Manajemen & Kewirausahaan*, Vol. 7, No. 1, 60-73.
- Tochija, I. (2007). *Kebijakan E-government dalam Meningkatkan Pelayanan Publik*.
- Valarie A. Zeithaml, A. P. (1990). *Delivering Quality Service: Balancing Customer Perceptions and Expertations*. New York, United States of America: Simon and Schuster.
- Vita Elysia, A. W. (2017). IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT UNTUK MENDORONG PELAYANAN PUBLIK YANG TERINTEGRASI DI INDONESIA. In I. M. Sri

Harijati, *Optimalisasi Peran Sains dan Teknologi untuk Mewujudkan Smart City* (pp. 353-380). Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.

Wahyudi, A. I. (2013, Januari 14). *Scribd*. Retrieved from Scribd:

<https://www.scribd.com/doc/120352891/KONSEP-PELAYANAN-PUBLIK>